

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDIT)



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 memuat Capaian Kinerja Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPENDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan guna penyempurnaan dalam penyusunan dimasa mendatang.

Kuala Tungkal, 9 Juni 2025

KEPALA BAPENDA



SUGIANTO, SE
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19670317 199002 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi.....	4
1.5. Sistematika Penyajian.....	10
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	11
2.2. Perjanjian Kinerja	13
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Bapenda	14
B. Realisasi Anggaran	48
Bab IV PENUTUP.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang telah ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan mengenai susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah di tetapkan dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 memuat Hasil Pengukuran Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Program/ Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, sebagai Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan salah satu unsur pemerintah daerah dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Isu – isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan Program dan Kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2021-2026) sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengelola objek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah
2. Meningkatkan kemampuan aparatur pemungut pajak daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah

3. Memenuhi fasilitas dan meningkatkan pelayanan pemungutan pajak daerah
4. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
5. Meningkatkan kualitas data base dalam pengelolaan potensi pajak daerah
6. Meningkatkan kerjasama pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 / 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri PAN Nomor PER / 09 / M. PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4).
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk Pertanggung Jawaban Instansi Pemerintah Selaku Penyelenggaraan Negara baik di tingkat

Pusat maupun di daerah yang berisikan tentang Informasi Keberhasilan maupun Kegagalan melaksanakan Misi Kepala Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah

1. Kedudukan dan Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Memperhatikan Surat Menteri dalam Negeri Nomor 800/8759/OTDA Tanggal 30 Desember 2021 Perihal Persetujuan Jabatan dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Provinsi Jambi melakukan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

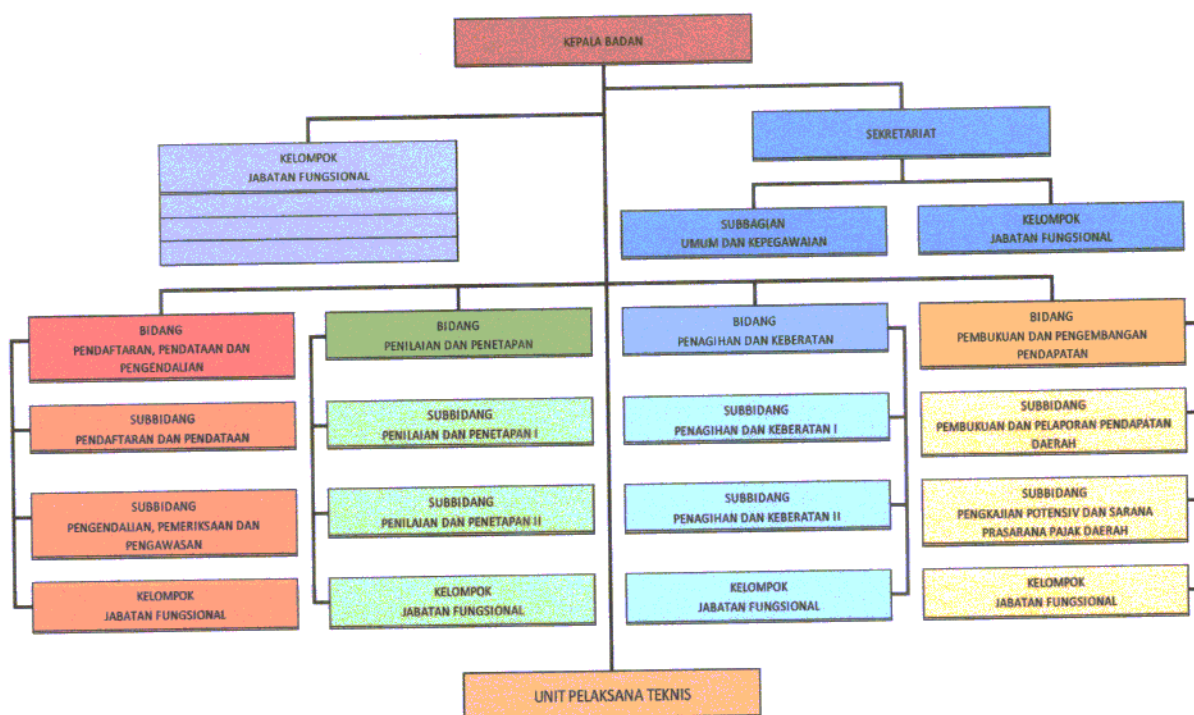
2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah



Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub bagian Umum Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian terdiri atas :
 1. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan
 2. Sub bidang Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Penilaian dan Penetapan terdiri atas:
 1. Sub bidang Penilaian dan Penetapan I
 2. Sub bidang Penilaian dan Penetapan II
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri atas :
 1. Sub bidang Penagihan dan Keberatan I
 2. Sub bidang Penagihan dan Keberatan II
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri atas :
 1. Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
 2. Sub bidang Pengkajian Potensi dan Sarana prasarana Pajak Daerah\
 3. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Sumber Daya Aparatur

Personil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sejumlah 124 orang yang terdiri dari 44 orang PNS, dan 80 orang tenaga kerja kontrak (TKK) yang di distributorkan ke 5 bidang sesuai dengan struktur organisasi dan tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Bidang	PNS	CPNS	TKK/TKS	Jumlah
1.	Sekretariat	11 Orang	-	29 Orang	40 Orang
2.	Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian	8 Orang	-	13 Orang	21 Orang
3.	Penilaian dan Penetapan	8 Orang	-	14 Orang	22 Orang
4.	Penagihan dan Keberatan	10 Orang	-	13 Orang	23 Orang
5.	Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	7 Orang	-	11 Orang	18 Orang
Jumlah		44 Orang	-	80 Orang	124 Orang

Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sarana kerja yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah adalah :

URAIAN	BANYAKNYA
KOMPUTER	
- Mini Komputer	1
- PC Unit	46
- Laptop	43
- Tablet /Gadget	23
- Komputer Jaringan Lainnya/server	7
- Personal Komputer Lainnya	41
- Printer (Peralatan Personal Komputer)	114
- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3
- Harddisk Internal/External	9
- Server	3
- Router	3
- Hub	3
- Peralatan Jaringan lainnya	8
PERALATAN OLAH RAGA	
- Peralatan Olah Raga Lainnya (dst)	1
ALAT ANGKUTAN	
- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7
- Sepeda Motor	35
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	

- Global Positioning System (GPS)	3
- Alat Pengukur Garis Tengah	3
- Alat ukur lain-lain lainnya	2
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
- Mesin Hitung Liskrik	1
- Mesin Kas Register	10
- Lemari Arsip 2 Pintu	6
- Lemari Arsip Kayu	2
- Lemari Besi/Metal	85
- Rak Besi	2
- Filing Cabinet Basi	3
- Brandkas	2
- Lemari Kaca	5
- CCTV	1
- Papan Visual/Papan Nama	53
- Alat Penghancur Kertas	6
- Mesin Absensi	1
- Papan Nama Instansi	1
- Papan Pengumuman	34
- Papan Tulis	2
- Teralis	1
- Alat Kantor Lainnya	5
- Meja Kerja Kayu/Rotan	15
- Kursi Besi dan Metal	280
- Kursi Putar	2
- Meja Rapat	3
- Meja Panjang	8
- Meja ½ Biro	28
- Kursi Fiber Glas/Plastik	1
- Kursi Tamu	13
- Meja Komputer	35
- Alat Pembersih lainnya	4
- Lemari Es	1
- AC Split	48
- Kipas Angin	4
- Televisi	7
- Sound System	3

- Unit Power Supply	43
- Stabilisator	7
- Camera film	2
- Alat Hiasan	17
- Tangga Aluminium	1
- Mimbar/Podium	1
- Hardy Cam	1
- Karpet	10
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	2
- Alat Pemadam Kebakaran lainnya	5
- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	35
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	18
- Kursi Kerja Pejabat lainnya	22
- Lemari Arsip	12
- Mesin Tik	1
- Box Plastik	10
- Exhaust Fan	10
- Kotak Surat	20
ALAT STUDIO, KOMUNIKAST DAN PEMANCAR	
- Uninterruptible Power Supply (UPS)	2
- Digital LED Running Text	3
- Layar Film/Projector	4
- Camera Digital	3
- Mesin Cetak Listrik Sheet	2
- Mesin Cetak Elektronik	1
- Facsimile	1
- Microphone	2
- Genset	1

5. Anggaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka seluruh kegiatan yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 pada APBDP Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam DPA Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran
1	PAD yang dikelola BAPENDA	Rp. 35.894.234.126
	- Pajak Daerah	Rp. 35.862.884.126
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Pendapatan Denda Pajak)	Rp. 31.350.000
2	Belanja	Rp. 12.958.062.236
	- Belanja Operasional	Rp. 12.574.517.236
	- Belanja Modal	Rp. 383.545.000

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

 A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

 B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan yang dipergunakan sebagai arah dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.

Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yaitu **“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” (BERKUALITAS, EKONOMI MAJU, RELIGIUS, KOMPETITIF, AMAN DAN HARMONIS).**

Visi tersebut diimplementasikan kedalam 5 misi, yaitu:

- Misi 1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak.
- Misi 2 : Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis.
- Misi 3 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
- Misi 4 : Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- Misi5 : Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai kota

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Secara umum tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkontribusi langsung

dalam mendukung pencapaian Misi 3 : Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik.

Tujuan yang ingin dicapai pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dengan Indikator Utama“PersentasePeningkatanPendapatan Asli Daerah TerhadapPendapatanDaerah”.

TARGET PENDAPATAN DAERAH PADA RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

No	Uraian	PROYEKSI PENERIMAAN PENDAPATAN (Rupiah)					
		2021	2022 (Base Line)	2023	2024	2025	2026
	PENDAPATAN DAERAH	1,247,761,849,420.00	1,150,000,000,000.00	1,199,800,001,000.00	1,243,840,001,500.00	1,299,812,800,000.00	1,364,803,440,500.00
I	Pendapatan Asli Daerah	120,000,000,000.00	96,135,351,000.00	101,660,000,000.00	111,945,600,000.00	123,482,215,500.00	136,480,344,500.00
1	Pajak Daerah	36,596,319,500.00	36,304,197,500.00	38,122,500,000.00	41,979,600,000.00	45,688,419,500.00	49,815,325,500.00
2	Retribusi Daerah	3,175,100,000.00	2,295,170,000.00	3,558,100,000.00	5,597,280,000.00	7,408,933,000.00	9,553,624,500.00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,238,139,900.00	11,226,000,000.00	12,707,500,000.00	13,993,200,000.00	15,435,277,000.00	17,060,043,000.00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	66,990,440,600.00	46,309,983,500.00	47,271,900,000.00	50,375,520,000.00	54,949,586,000.00	60,051,351,500.00
II	Dana Transfer	1,088,436,649,420.00	1,010,039,349,000.00	1,052,342,562,500.00	1,083,807,091,000.00	1,125,838,908,500.00	1,175,306,836,500.00
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	244,465,259,000.00	244,518,751,000.00	251,854,313,500.00	259,409,943,000.00	269,786,341,000.00	281,926,726,000.00
2	Dana Alokasi Umum	495,245,924,000.00	479,384,508,000.00	488,972,198,500.00	503,641,364,500.00	518,750,605,500.00	534,313,123,500.00
3	Dana Alokasi Khusus	166,169,575,000.00	117,228,229,000.00	117,957,501,000.00	117,392,291,500.00	123,562,447,000.00	134,341,003,500.00
4	DID (Dana Insentif Daerah)	25,251,347,000.00	7,575,404,000.00	25,251,347,000.00	27,776,482,000.00	30,554,129,500.00	33,609,542,500.00
5	Dana Desa dan Desa Adat	109,187,748,000.00	109,187,748,000.00	113,555,258,000.00	118,097,468,500.00	122,821,367,000.00	127,734,221,500.00
6	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	46,616,796,420.00	52,144,709,000.00	54,751,944,500.00	57,489,541,500.00	60,364,018,500.00	63,382,219,500.00
7	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau	1,500,000,000.00	0.00	0.00			

No	Uraian	PROYEKSI PENERIMAAN PENDAPATAN (Rupiah)					
		2021	2022 (Base Line)	2023	2024	2025	2026
	Pemerintahan Daerah Lainnya						
III	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	39,325,200,000.00	43,825,300,000.00	45,797,438,500.00	48,087,310,500.00	50,491,676,000.00	53,016,259,500.00
1	Hibah	39,325,200,000.00	43,825,300,000.00	45,797,438,500.00	48,087,310,500.00	50,491,676,000.00	53,016,259,500.00
2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Lembar/ Dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna melaksanakan Program/Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penerimaan pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatn Daerah	Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	10,83%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Nilai Akip	81,00 76,43

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur dari Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 berdasarkan target Tahunan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 :

**Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	10,83%	11,10%	102,47%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,00	82,06	101,31%
		- Nilai AKIP	76,43	78,44	102,63%

Pengukuran kinerja terhadap target indikator pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. SASARAN 1 :

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024 dengan Target 10,83%.

Sebagai Dasar untuk mengukur Capaian Kinerja Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 yakni Realisasi dari Target Pendapatan Asli Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat pada APBDP Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

**Rekapitulasi Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan PAD Yang Dikelola
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024**

No	Jenis Penerimaan	Penerimaan Daerah			PAD yang dikelola BAPENDA		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pajak Daerah	35.862.884.126,00	33.570.220.578,00	93,61	35.862.884.126,00	33.570.220.578,00	93,61
	Pajak Hotel	428.500.000,00	591.976.652,00	138,15	428.500.000,00	591.976.652,00	138,15
	Pajak Restoran	4.712.000.000,00	3.355.747.586,00	71,22	4.712.000.000,00	3.355.747.586,00	71,22
	Pajak Hiburan	15.000.000,00	15.629.600,00	104,20	15.000.000,00	15.629.600,00	104,20
	Pajak Reklame	514.000.000,00	420.474.858,00	81,80	514.000.000,00	420.474.858,00	81,80
	Pajak Penerangan Jalan	17.160.434.126,00	18.202.300.149,00	106,07	17.160.434.126,00	18.202.300.149,00	106,07
	Pajak Parkir	25.900.000,00	56.984.400,00	220,02	25.900.000,00	56.984.400,00	220,02
	Pajak Air Bawah Tanah	350.000.000,00	537.980.555,00	153,71	350.000.000,00	537.980.555,00	153,71
	Pajak Sarang Burung Walet	52.000.000,00	59.456.000,00	114,34	52.000.000,00	59.456.000,00	114,34
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.685.050.000,00	1.655.999.320,00	98,28	1.685.050.000,00	1.655.999.320,00	98,28
	Pajak PBB P2	5.500.000.000,00	4.641.946.198,00	84,40	5.500.000.000,00	4.641.946.198,00	84,40
	Pajak BPHTB	5.420.000.000,00	4.031.725.260,00	74,39	5.420.000.000,00	4.031.725.260,00	74,39
2.	Retribusi Daerah	1.938.500.000,00	2.955.587.944,64	152,47	-	-	-
	Retribusi Jasa Umum	311.500.000,00	257.500.000,00	82,66	-	-	-
	Retribusi Jasa Usaha	927.000.000,00	1.132.012.000,00	122,12	-	-	-
	Retribusi Perizinan Tertentu	700.000.000,00	1.566.075.944,64	223,73	-	-	-
3.	Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.495.329.143,00	12.456.747.696,37	92,30	-	-	-
	Bank Jambi (Deviden)	12.113.000.000,00	11.453.060.328,10	94,55	-	-	-
	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo	1.382.329.143,00	1.003.687.368,27	72,61	-	-	-
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	67.395.936.734,00	89.057.339.211,36	132,14	31.350.000,00	58.746.436,00	187,39
	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	166.000.000,00	183.652.650,00	110,63	-	-	-
	Jasa Giro	2.000.000.000,00	3.374.686.460,69	168,73	-	-	-
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	530.000.000,00	5.776.000,00	1,09	-	-	-
	Pendapatan Bunga	4.000.000.000,00	15.156.181.395,47	378,90	-	-	-
	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	-	-
	Pendapatan Denda Pajak	31.350.000,00	58.746.436,00	187,39	31.350.000,00	58.746.436,00	187,39
	Pendapatan Dari Pengembalian	817.200.500,00	7.616.714.530,87	932,05	-	-	-
	Pendapatan BLUD	59.851.386.234,00	62.661.581.738,33	104,70	-	-	-
	Jumlah PAD (1+2+3+4)	118.692.650.003,00	138.039.895.430,37	116,30	35.894.234.126,00	33.628.967.014,00	93,69

Untuk Mengukur Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dapat Kita lihat pada Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dengan Formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi PAD th 2024}}{\text{Target Pendapatan Daerah pada Renstra / RPJMD th 2024}} \times 100\%$$

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 Rp. 138.039.895.430,37 dan Target Pendapatan Daerah pada Renstra/RPJMD Tahun 2024 Sebesar Rp.1.243.840.001.500,00 Jadi, Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. 138.039.895.430,37}}{\text{Rp. 1.243.840.001.500,00}} \times 100\% = 11,10\%$$

Sedangkan mengukur capaian kinerja dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} = \frac{11,10\%}{10,83\%} \times 100\% = 102,47\%$$

Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024 dari Target 10,83% terealisasi 11,10% dengan Capaian Kinerja 102,47%. Yang terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah terealisasi 93,61%, Retribusi Daerah terealisasi 152,47%, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan terealisasi 92,30% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi 132,14% dari masing-masing Target Penerimaan 100%.

2. SASARAN 2 :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 81,00

Hasil Survei pengukuran IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dengan 9 unsur penilaian antara lain:

1. Persyaratan Pelayanan
2. Prosedur Pelayanan
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya / Tarif Pelayanan
5. Produk / Hasil Pelayanan
6. Kemampuan Petugas Pelayanan
7. Perilaku Petugas Pelayanan
8. Maklumat Pelayanan
9. Mekanisme Pengaduan Pelayanan

Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Capaian Nilai IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah pada Tahun 2024 terealisasi 82,06 dari target 81,00 dengan capaian kinerja 101,31 %.

- Nilai AKIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pemenuhan Dokumen Perencanaan, Implementasi Pelaporan dan Evaluasi SAKIP Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari target Nilai 76,43 terealisasi 78,44 dengan capaian 102,63%.

• **Capaian Kinerja PAD Yang Dikelola Bapenda Tahun 2024**

PAD yang dikelola Bapenda pada Tahun 2024 yakni Pajak Daerah yang terdiri dari 11 jenis Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah (Pendapatan Denda Pajak Daerah) Penerimaan Pendapatan untuk Pajak Daerah dari target sebesar Rp. 35.862.884.126,00 terealisasi sebesar Rp. 33.570.220.578,00 dengan capaian 93,61% dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Hotel dari target sebesar Rp. 428.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 591.976.652,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 163.476.652,00 dengan capaian 138,15%
2. Pajak Restoran dari target sebesar Rp. 4.712.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.355.747.586,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 1.356.252.414,00 dengan capaian 71,22%.
3. Pajak Hiburan dari target sebesar Rp. 15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 15.629.600,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 629.600,00 dengan capaian 104,20%
4. Pajak Reklame dari target sebesar Rp. 514.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 420.474.858,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 93.525.142,00 dengan capaian 81,80%
5. Pajak Penerangan Jalan dari target sebesar Rp. 17.160.434.126,00 terealisasi sebesar Rp. 18.202.300.149,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.041.866.023,00 dengan capaian 106,07%
6. Pajak Parkir dari target sebesar Rp. 25.900.000,00 terealisasi sebesar Rp. 56.984.400,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 31.084.400,00 dengan capaian 220,02%
7. Pajak Air Bawah Tanah dari target sebesar Rp. 350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 537.977.655,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 187.977.655,00 dengan capaian 153,71%
8. Pajak Sarang Burung Walet dari target sebesar Rp. 52.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 59.456.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 7.456.000,00 dengan capaian 114,34%
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari target sebesar Rp. 1.685.050.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.655.999.320,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 29.050.680,00 dengan capaian 98,28%

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari target sebesar Rp. 5.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.641.864.774,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 858.135.226,00 dengan capaian 84,40%
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target sebesar Rp. 5.420.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.031.725.260,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 1.388.274.740,00 dengan capaian 74,39%

Sedangkan untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Denda Pajak dari target Rp. 31.350.000,00 terealisasi sebesar Rp. 58.746.436,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 27.396.436,00 dengan capaian 187,39%.

Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 yang terdiri dari 11 jenis Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar 93,69%, ini disebabkan :

Ada beberapa Jenis Pajak Daerah yang Realisasinya Melampaui Target diantaranya Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, sedangkan Pajak Daerah yang belum tercapai Targetnya akan terus Kami upayakan dan dilaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi secara Optimal dengan cara :

- a. Melakukan Pendataan Terhadap Subjek Dan Objek Pajak Daerah
- b. Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi Terkait
- c. Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Penerimaan Daerah
- d. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Melalui Kegiatan Penyuluhan Pajak Pajak Daerah
- e. Terus Berupaya Menggali Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.

Capaian Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024

Tahun													
No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
		Target (Rp.)	Target (Rp.)	%	Target (Rp.)	Target (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	PAJAK DAERAH - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penertaman Jalan - Pajak Parkir - Pajak Air Tanah - Pajak Sarang Burung Walet - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - PBB 2 - Pajak BPHTB	36.121.319.500,00 119.950.000,00 3.620.000.000,00 11.840.000,00 436.000.000,00 18.125.239.000,00 20.900.000,00 63.000.000,00 200.000.000,00 1.524.390.500,00 5.500.000.000,00 6.500.000.000,00	31.752.296.480,00 185.104.100,00 4.131.923.262,00 3.594.500,00 354.084.745,00 18.078.239.466,00 30.566.400,00 21.111.566,00 115.044.800,00 1.584.866.425,00 4.640.360.253,00 2.607.409.963,00	87,90 154,32 114,14 30,36 81,21 99,74 146,25 33,51 57,52 103,97 84,37 40,11	31.184.696.493,00 180.000.000,00 3.787.000.000,00 3.594.500,00 422.908.324,00 17.010.434.126,00 35.000.000,00 81.900.000,00 295.000.000,00 1.524.390.500,00 5.500.000.000,00 5.416.405.993,00	105,83 169,22 124,40 76,89 84,58 122,64 115,74 25,97 26,60 87,31 83,83 82,72	32.449.232.773,00 428.500.000,00 4.491.372.773,00 7.550.000,00 367.964.998,00 14.000.000.000,00 65.000.000,00 82.000.000,00 295.000.000,00 1.645.800.000,00 5.500.000.000,00 5.420.000.000,00	109,34 117,10 83,95 122,77 71,59 118,79 71,96 30,59 17,82 125,96 87,46 132,65	36.476.535.503,00 501.754.583,00 3.770.677.545,00 9.344.900,00 367.964.998,00 16.631.172.549,00 46.775.700,00 25.084.172,00 52.576.000,00 2.073.029.000,00 4.810.342.247,00 7.189.814.409,00	109,34 117,10 83,95 122,77 71,59 118,79 71,96 30,59 17,82 125,96 87,46 132,65	35.862.884.126,00 428.500.000,00 4.712.000.000,00 15.000.000,00 420.474.838,00 17.160.434.126,00 25.900.000,00 350.000.000,00 52.000.000,00 1.685.050.000,00 5.500.000.000,00 5.420.000.000,00	93,61 138,15 71,22 104,20 81,80 106,07 220,02 153,71 114,34 98,28 84,40 74,39	
2.	RETRIBUSI DAERAH - Retribusi Jasa Umum - Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Perizinan Tertentu	3.430.808.796,00 1.740.708.796,00 788.600.000,00 901.500.000,00	2.566.363.182,00 1.232.827.533,00 777.082.200,00 556.453.419,00	74,80 70,82 98,54 61,73	2.581.266.250,00 1.626.266.250,00 828.095.200,00 200.000.000,00	93,86 92,38 109,68 46,10	2.313.111.485,00 1.032.111.853,00 730.000.000,00 551.000.000,00	111,25 108,38 130,93 90,54	2.573.298.995,00 1.118.585.253,00 955.815.700,00 498.897.442,00	111,25 108,38 130,93 90,54	1.938.500.000,00 311.500.000,00 927.000.000,00 700.000.000,00	182,47 82,66 122,12 223,73	
3.	HASIL PENGELOLA KEMAYANGAN DAERAH YANG DIPERSAHKAN - Bank Jambi (Dividen) - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tunggul Rajo	13.238.139.900,00 11.732.139.900,00 1.506.000.000,00	10.719.917.975,50 9.638.772.829,50 1.081.145.146,00	80,98 82,16 71,79	11.226.000.000,00 9.796.000.000,00 1.430.000.000,00	104,25 107,48 82,15	13.495.329.143,00 12.113.000.000,00 1.382.329.143,00	92,20 92,37 90,78	12.443.280.635,06 11.188.346.843,74 1.254.933.791,32	92,20 92,37 90,78	13.495.329.143,00 12.113.000.000,00 1.382.329.143,00	92,30 94,55 72,61	
4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG ASLI - Hasil Penghasilan Aneka Daerah Yang Tidak Dijualkan - Jasa Giro - Hasil Pengelolaan Dana Bergairah - Pendapatan Bunga - Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - Pendapatan Denda Pajak Daerah - Pendapatan Denda Pengembalian - Pendapatan BLUD - Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah - Pendapatan dan Penerimaan Lainnya	67.659.325.510,00 393.000.000,00 700.000.000,00 395.016.510,00 12.550.000.000,00 - - - 10.000.000,00 5.810.000.000,00 47.801.309.000,00 - - -	76.867.438.049,89 517.783.060,00 2.075.367.698,41 5.452.260,00 12.601.452.027,92 4.516.000,00 119.174.666,26 407.976,00 7.854.143.298,30 53.689.131.063,00 - - -	113,61 131,75 296,48 1,38 100,41 - - 4,08 135,18 112,32 - - -	79.642.348.500,00 582.000.000,00 500.000.000,00 765.674.600,00 8.000.000.000,00 - - 26.350.000,00 7.001.000.000,00 51.316.014.900,00 11.451.309.000,00 - - -	104,64 164,66 1.185,72 - 60,97 - - 222,67 30,47 114,36 198,55 - - -	77.351.418.901,00 170.000.000,00 4.400.000.000,00 10.000.000,00 12.336.310.084,00 - - 26.350.000,00 8.512.272.082,00 51.896.486.135,00 10.591.484.725,00 - - -	101,26 483,98 123,32 - 68,92 - - 312,51 78,75 109,33 - - -	89.087.339.211,36 183.652.650,00 3.374.686.460,69 5.776.000,00 15.156.181.395,47 - - 58.746.456,00 7.616.714.530,87 62.661.581.738,33 - - -	132,14 110,63 168,73 1,09 378,90 - - 187,39 932,05 104,70 - - -			
	Jumlah PAD	120.449.593.706,00	121.906.005.687,39	101,21	124.644.311.243,00	104,68	125.609.982.670,00	102,85	128.818.546.430,46	102,85	118.697.650.000,00	116,30	

5.	PENDAPATAN TRANSFER	1.182.004.537.563,00	1.375.003.659.861,00	116,33	1.250.324.459.160,00	1.534.306.541.135,00	122,72	1.324.886.356.520,00	1.364.638.482.085,00	103,00	1.924.609.410.848,00	1.871.370.786.390,00	97,23
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.123.019.928.705,00	1.306.889.767.385,00	116,37	1.174.968.061.000,00	1.456.342.860.145,00	123,95	1.233.788.648.449,00	1.274.408.774.114,00	103,29	1.854.391.787.000,00	1.801.661.723.106,00	98,22
	Dana Pembangan	988.580.733.705,00	1.172.474.050.195,00	118,60	1.067.821.796.000,00	1.349.195.795.145,00	126,35	1.117.214.723.849,00	1.157.825.849.114,00	103,64	1.713.851.127.000,00	1.681.121.063.106,00	98,09
	Dana Insentif Daerah (DID)	25.251.347.000,00	25.251.347.000,00	100,00	11.445.780.000,00	11.445.780.000,00	100,00	17.494.167.000,00	17.494.167.000,00	100,00	7.239.827.000,00	7.239.827.000,00	100,00
	Dana Desa	109.187.748.000,00	109.164.370.690,00	99,98	95.700.485.000,00	95.700.485.000,00	100,00	99.079.758.000,00	99.079.758.000,00	100,00	97.495.393.000,00	100.455.713.000,00	103,04
	Insentif Pical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.805.440.000,00	12.845.120.000,00	81,27
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	58.984.708.858,00	68.113.891.976,00	115,48	75.256.398.160,00	77.863.780.990,00	103,60	91.097.707.971,00	90.237.707.971,00	99,06	90.217.823.848,00	69.709.063.284,00	77,27
	- Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi	52.144.708.858,00	60.073.891.976,00	115,21	61.856.398.160,00	64.563.780.990,00	104,38	77.047.707.971,00	77.047.707.971,00	100,00	76.167.823.848,00	65.039.063.284,00	85,39
	- Bantuan Keuangan dari Provinsi	6.840.000.000,00	8.040.000.000,00	117,54	13.400.000.000,00	13.400.000.000,00	100,00	14.050.000.000,00	13.190.000.000,00	93,88	14.050.000.000,00	4.670.000.000,00	33,34
	LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.483.350.000,00	46.869.026.824,00	107,79	942.142.858,00	196.307.214,00	20,84	-	-	-	-	-	-
	- Pendapatan Hibah Provinsi	43.483.350.000,00	46.869.026.824,00	107,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian dan Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perantara Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	-	942.142.858,00	196.307.214,00	20,84	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	1.345.937.481.269,00	1.540.399.130.692,64	114,45	1.575.810.913.261,00	1.668.016.502.341,07	121,02	1.450.496.439.690,00	1.493.466.728.515,46	103,96	2.043.302.360.851,00	2.009.410.681.820,37	98,34

Data Laporan Penerimaan Tahun 2024 Audit BPK RI

• Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain Yang Sah Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

NO.	JENIS PENERIMAAN	2024		ALASAN
		TARGET	REALISASI %	
A.	PAJAK DAERAH	35.862.884.126,00	33.570.220.578,00	
1.	Pajak Hotel Hotel Melati Satu Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/ Rumah Kos	428.500.000,00 400.000.000,00 28.500.000,00	591.976.652,00 574.836.652,00 17.140.000,00	Realisasi Pajak Hotel melebihi target sebesar 38,15% disebabkan oleh : Peningkatan ini disebabkan mulai berjalannya aktifitas masyarakat terutama para pelaku usaha yang bangkit dan beberapa event lokal maupun nasional yang ditetapkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sehingga pengguna jasa perhotelan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat. Bertambahnya tempat rekreasi, penyeberangan antar daerah angkutan orang dan barang yang mendorong dunia usaha perhotelan semakin bersaing dalam memberikan jasa pelayanan terbaik bagi pengunjung hotel.
2.	Pajak Restoran Rumah Makan Kantin / Warung kopi / Kopi	4.712.000.000,00 3.642.000.000,00 1.070.000.000,00	3.355.747.586,00 2.027.857.519,00 1.327.890.067,00	Realisasi Pajak Restoran tidak tercapai disebabkan oleh: Beberapa perusahaan melakukan pemberhentian karyawan sehingga berkurangnya kegiatan pada perusahaan-perusahaan dan berhimbis pada catering bagi karyawan yang ada dalam wilayah kabupaten tanjung jabung barat, juga disebabkan terjadinya pengaruh ekonomi masyarakat akibat melenahnya harga hasil pertanian dan perkebunan, sehingga berpengaruh terhadap usaha kuliner.
3.	Pajak Hiburan Permainan Bilyard Pusat Kebugaran (Fittes Center) Penyelenggaraan Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana Karaoke Pertandingan Olahraga	15.000.000,00 - 5.000.000,00 8.000.000,00 - 2.000.000,00	15.629.600,00 - 2.419.600,00 11.720.000,00 - 1.490.000,00	Realisasi Pajak Hiburan melebihi target Sebesar 4,20% disebabkan : Mulai berkembangnya usaha hiburan di kabupaten tanjung jabung barat seperti fittes, permainan anak-anak, dan adanya usaha hiburan insidentil berupa hiburan rakyat.

4.	Pajak Reklame Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron Reklame Kain/Spanduk	514.000.000,00 460.000.000,00 54.000.000,00	420.474.858,00 359.192.958,00 61.281.900,00	81,80 78,09 113,49	Realisasi pajak Reklame tidak mencapai target disebabkan : - Tahun 2024 merupakan tahun politik, sehingga banyaknya media yang biasanya di gunakan untuk pemasangan iklan dialihkan fungsinya menjadi media kampanye oleh parpol. - Pemantauan terhadap perpanjangan izin perdagangan atau tempat usaha tidak terpanlau mengingat perpanjangan izin melalui aplikasi OSS mengingat yang sebelumnya ketika suatu usaha yang akan melakukan perpanjangan izin harus melakukan pembayaran Pajak Reklame ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
5.	Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Penerangan Jalan Non PLN	17.160.434.126,00 15.592.866.459,00 1.567.567.667,00	18.202.300.149,00 18.160.328.644,00 41.971.505,00	106,07 116,47 2,68	Realisasi Pajak PPJ melebihi target sebesar 6,07% di sebabkan oleh: - adanya peningkatan pembayaran Pajak Penerangan Jalan oleh PLN yang disebabkan peningkatan penjualan daya listrik dan penambahan pelanggan baru . - dapatnya di pungut kembali pajak penerangan jalan non PLN oleh perusahaan.
6.	Pajak Parkir	25.900.000,00	56.984.400,00	220,02	Realisasi Pajak parkir melebihi target sebesar 120,02% disebabkan: - Makin bertambahnya objek parkir di tanjung jabung barat seperti usaha mini market. - Adanya wajib pajak yang membayarkan pajak tertutang tahun 2023 ditahun 2024
7.	Pajak Air Bawah Tanah	350.000.000,00	537.980.555,00	153,71	Realisasi Pajak Air Bawah Tanah meningkat sebesar 53,71% disebabkan : Adanya perubahan tarif daya dasar pengenaan pajak air tanah yang menyebabkan meningkatnya nilai pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.
8.	Pajak Sarang Burung Walet	52.000.000,00	59.456.000,00	114,34	Realisasi Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet melebihi target sebesar 14,34% disebabkan oleh: - Adanya intensifikasi dalam melakukan penagihan langsung kelapangan oleh tim penagihan.
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasir dan Kerikil Tanah Liat Pajak Granit / Andesit Batu Split Tanah Urug Tanah Laterik Tanah Serap (Fullers Earth)	1.685.050.000,00 - 1.300.000,00 - 1.548.750.000,00 - 25.000.000,00 110.000.000,00	1.655.999.320,00 - - - 704.505.000,00 - 848.894.320,00 102.600.000,00	98,28 - - - 45,49 - 3.395,58 93,27	Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak mencapai target disebabkan oleh: - Cuaca yang tidak menentu di november dan desember 2024 sehingga mengurangi aktifitas di tambang/kuari. - habis nya masa IUP salah satu WP MBLB yang mengakibatkan WP tidak bisa melakukan kegiatan.

10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5.500.000.000,00	4.641.946.198,00	84,40	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan tidak mencapai target disebabkan : - adanya perubahan aplikasi dari sismiop ke aplikasi berbasis web sehingga terjadi keterlambatan dalam proses penginputan data dan cetak masal SPPT - keterlambatan penyampaian SPPT PBB-P2 dikarenakan keterlambatan cetak masal yang biasanya di maret menjadi mei 2024 - masih ditemukannya data yang tidak valid (Data ganda ,objek pajak yang tidak ditemukan, dan kesalahan identitas) - kesadaran masyarakat masih kurang dalam pembayaran PBB-P2 - Belum maksimalnya pelayanan PBB-P2 melalui mobil kelling.
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.420.000.000,00	4.031.725.260,00	74,39	Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tidak mencapai target di sebabkan : Adanya program pemerintah pusat (PTSL) terkait kepengurusan sertifikat gratis untuk masyarakat tidak mampu, sehingga mempengaruhi penerimaan BPHTB tahun 2024 .
B.	RETRIBUSI DAERAH	1.938.500.000,00	2.955.587.944,64	152,47	
12.	Retribusi Jasa Umum	311.500.000,00	257.500.000,00	82,66	-
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.000.000,00	71.082.000,00	88,85	OPD Dinas Lingkungan Hidup
	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	120.000.000,00	72.700.000,00	60,58	OPD Dinas Perhubungan
	Retribusi Pelayanan Pasar	111.500.000,00	113.718.000,00	101,99	OPD Dinas Perdagangan dan Koperasi
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	OPD Dinas Perhubungan
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	-	-
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	OPD Dinas Kominfo
13.	Retribusi Jasa Usaha	927.000.000,00	1.132.012.000,00	122,12	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	400.000.000,00	391.636.000,00	97,91	-
	Retribusi Terminal	-	-	-	OPD Dinas Perhubungan
	Retribusi Pelayanan Ke Pelabuhan	400.000.000,00	613.827.000,00	153,46	OPD Dinas Perhubungan
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	105.000.000,00	103.869.000,00	98,92	OPD Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
					- Alasan Realisasi tidak mencapai target dikarenakan pada 2 bulan yaitu

	Retrisbusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	22.000.000,00	22.680.000,00	103,09	bulan oktober dan november destinasi wisata mangrove pangkal babu desa tungkal 1 mengalami perbaikan/rehab bangunan sehingga selama 2 bulan mangrove pangkal babu desa tungkal 1 tutup secara total dan kurang maksimal sarana dan prasarana olahraganya. OPD Dinas Perikanan
14.	Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Usaha Perikanan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	700.000.000,00 - 200.000.000,00 500.000.000,00	1.566.075.944,64 - 1.097.435.173,00 468.640.771,64	223,73 - 548,72 93,73	OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang OPD Dinas Tenaga Kerja - Pembayaran Perpanjangan retribusi PTKA pada perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA) dalam kabupaten tanjung jabung barat.
C.	HASIL PENGELOLA KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAHKAN	13.495.329.143,00	12.456.747.696,37	92,30	
15.	Bank Jambi (Deviden)	12.113.000.000,00	11.453.060.328,10	94,55	
16.	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tango Rajo	1.382.329.143,00	1.003.687.368,27	72,61	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
D.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	67.395.936.734,00	89.057.339.211,36	132,14	
17.	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Di Pisahkan	166.000.000,00	183.652.650,00	110,63	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
18.	Penerimaan Jasa Giro	2.000.000.000,00	3.374.686.460,69	168,73	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
19.	Pendapatan Bunga	4.000.000.000,00	15.156.181.395,47	378,90	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
20.	Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	-	-	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
21.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
22.	Pendapatan Denda Pajak	31.350.000,00	58.746.436,00	187,39	OPD Badan Pendapatan Daerah
23.	Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	

24.	Pendapatan Dari Pengembalian	817.200.500,00	7.616.714.530,87	932,05	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
25.	Pendapatan BLUD	59.851.386.234,00	62.661.581.738,33	104,70	OPD Dinas Kesehatan Realisasi Pendapatan Blud melebihi target dikarenakan meningkatnya kunjungan rawat inap dan rawat jalan 2024 ,adanya penambahan pelayanan kesehatan seperti poli bedah dan operasi, penambahan jadwal kunjungan pasien terus meningkat, khususnya pasien BPJS.
28.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	530.000.000,00	5.776.000,00	1,09	OPD Dinas Koperindagkop

Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2024

No.	Jenis Penerimaan	2024			Alasan
		Target	Realisasi	%	
I.	PENDAPATAN TRANSFER	1.924.609.610.848,00	1.871.370.786.390,00	97,23	Penyaluran sesuai dengan Perpres No 76 tahun 2024 tentang rincian APBN tahun 2024/ dan PMK No 139.70/2023 tentang pengelolaan Dana DBH, DAU dan Dana Otonomi Khusus
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT	1.834.391.787.000,00	1.801.661.723.106,00	98,22	
1.	Dana Perimbangan	1.713.851.127.000,00	1.681.121.063.106,00	98,09	
	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	933.510.958.000,00	927.121.176.000,00	99,32	
	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	557.710.000.000,00	557.710.000.000,00	100,00	
	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	5.936.082.000,00	5.936.082.000,00	100,00	Penyaluran sesuai dengan Perpres No 76/ 2024 dan PMK No.139/PMK.07/2023 tentang pengelolaan DBH, DAU dan Dana Otonomi Khusus.
	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 & Pasal 29/ WPDPN	215.841.000,00	215.841.000,00	100,00	
	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	4.545.000,00	-	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	110.280.758.000,00	110.280.758.000,00	100,00	Penyaluran sesuai dengan Perpres No 76/ 2024 dan PMK No.139/PMK.07/2023 tentang pengelolaan DBH, DAU dan Dana Otonomi Khusus.
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	212.439.561.000,00	212.439.561.000,00	100,00	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara (LandRent)	287.637.000,00	287.637.000,00	100,00	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara (Royalty)	19.924.851.000,00	19.924.851.000,00	100,00	

	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.394.327.000,00	-	-	Belum dilakukannya penyampaian laporan sisa alokasi dana DR untuk semester I & II sesuai dengan Kemenkeu No. S.130/PK/2024 tanggal 24 oktober 2024 tentang pedoman pelaksanaan penyaluran transfer ke daerah (TKD) akhir tahun 2024
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	-	-	-	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Dana Reboisasi	-	-	-	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.376.539.000,00	1.376.539.000,00	100,00	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Sawit	18.945.362.000,00	18.945.362.000,00	100,00	
	Dana Alokasi Umum (DAU)	570.085.195.000,00	550.052.374.982,00	96,49	Belum dilakukannya penyampaian pelaporan terkait dengan penggunaan alokasi dana penggajian formasi P3K, termasuk penyampaian laporan penggunaan sisa alokasi dana DR sesuai surat menteri keuangan No. S-130/PK/2024 tanggal 24 Oktober 2024.
	Dana Alokasi Umum (DAU)	494.717.391.000,00	494.717.391.000,00	100,00	
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah	71.367.804.000,00	51.045.025.982,00	71,52	
	DAU Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah, Tahun 2024	-	289.958.000,00	-	
	Dana Alokasi Khusus (DAK)				
	a. DAK Fisik	72.778.615.000,00	69.578.191.171,00	95,60	
	b. DAK Non Fisik	137.476.359.000,00	134.369.320.953,00	97,74	
2.	Dana Insentif Daerah (DID)	7.239.827.000,00	7.239.827.000,00	100,00	
3.	Dana Desa	97.495.393.000,00	100.455.713.000,00	103,04	
4.	Insentif Fiskal	15.805.440.000,00	12.845.120.000,00	81,27	

	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN DAERAH	90.217.823.848,00	69.709.063.284,00	77,27	Tidak dilakukannya transfer dari Provinsi terkait dengan dana DBH pajak dan alokasi bantuan provinsi di akibatkan dari kondisi kemampuan keuangan sehingga dilakukan penundaan penyaluran sebagaimana surat Gubernur No. S-3571/BPKPD-2.1/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024
1.	Dana Bagi Hasil Pajak				
	a. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	76.167.823.848,00	65.039.063.284,00	85,39	
	b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.107.388.485,00	10.619.197.035,00	70,29	
	c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.217.670.943,00	7.871.829.655,00	70,17	
	d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	30.482.297.496,00	28.193.561.808,00	92,49	
	e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	188.153.221,00	168.781.301,00	89,70	
2.	Bantuan Keuangan	14.050.000.000,00	4.670.000.000,00	33,24	
	a. Bantuan Keuangan Umum dari Provinsi	19.172.313.703,00	18.185.693.485,00	94,85	
	b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintahan Kabupaten/Kota	14.050.000.000,00	4.670.000.000,00	33,24	
		-	-	-	

❖ **Perkembangan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023-2024 terjadi Peningkatan, dari tabel Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023-2024 diatas dapat kita lihat bahwa Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Rp. 1.493.456.728.515,46 sedangkan Tahun 2024 Rp. 2.009.410.681.820,37. Jumlah tersebut merupakan Akumulasi dari jumlah penerimaan pendapatan asli daerah ditambah Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah pada Tahun 2023-2024 terjadi Penurunan, Realisasi PAD Tahun 2023 Sebesar Rp. 128.818.246.430,46, Target Penerimaan Daerah pada Renstra/RPJMD Tahun 2023 Sebesar Rp.1.199.800.001.000,00 dan Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dari Target 8,12% terealisasi sebesar 10,74% Sedangkan Untuk Tahun 2024 Realisasi Penerimaan Asli Daerah Sebesar Rp. 138.039.895.430,37 dan Target Pendapatan Daerah pada Renstra/RPJMD Rp.1.243.840.001.500,00 dari Target 10,83% terealisasi sebesar 11,10% terjadi Peningkatan sebesar 0,63% dari Tahun Sebelumnya.

2. Pendapatan Transfer

Penerimaan Pendapatan Transfer Mengalami Peningkatan dari Tahun Sebelumnya, Penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2023 Sebesar Rp. 1.364.638.482.085,00 dari Target Rp. 1.324.886.356.820,00 atau 103,00% sedangkan Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 1.871.370.786.390,00 dari Target Rp. 1.924.609.610.848,00 atau 97,23%. Pendapatan Transfer Terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintahan Daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Tahun 2024 tidak ada Penerimaan dari alokasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	Realisasi		Jumlah	Kinerja (%)
	Pajak Daerah	Lain-lain PAD yang sah		
2021	31.635.068.045,00	117.636.411,00	31.752.704.456,00	2,99
2022	33.014.821.695,00	58.672.782,00	33.073.494.477,00	4,16
2023	35.478.535.503,00	82.346.543,00	35,560,882,046.00	7,52
2024	33.570.220.578,00	58.746.436,00	33.628.967.014.00	-5,43

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2021 - 2024 mengalami Peningkatan. sedangkan untuk Tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

5. Perkembangan Kontribusi PAD dan PAD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kontribusi Penerimaan PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan PAD Tahun 2021-2024.

Tahun	Realisasi Penerimaan Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah	Realisasi PAD yang dikelola Dipenda	Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan Daerah	Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan PAD
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)
2021	1.540.399.130.692,64	118.526.444.007,64	7,69	31.752.704.456,00	2,06	26,79
2022	1.665.016.502.341,07	130.480.014.294,38	7,84	33.073.494.477,00	1,99	25,35
2023	1,493,456,728,515.46	128,818,246,430.46	8.63	35,560,882,046.00	2.38	27.61
2024	2,009,410,681,820.37	138,039,895,430.37	6.87	33,628,967,014.00	1.67	24.36

Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2021-2024 berkisar di atas 6% - 8%, sedangkan Perkembangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2021-2024 hanya berkisar antara 1% - 2%, untuk tahun 2024 berdasarkan Realisasi Penerimaan Daerah untuk kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah Sebesar 6,87%, sedangkan untuk kontribusi PAD yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah Sebesar 1,67% dan Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 24,36%.

3. Capaian Kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dan Rpjmd Menurut Urusan Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

Capaian kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2021 sampai dengan 2026, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran PAD						Realisasi Kinerja Sasaran PAD						Capaian Kinerja Sasaran PAD					
			Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026	Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026	Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	7,98%	8,06%	8,12%	8,16%	8,18%	8,18%	9,77%	11,35%	10,83%	11,10%	-	-	122,43 %	140,82 %	133,37 %	102,47 %	-	-
		- Persentase capaian penerimaan PBB dan BPHTB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	59,92%	83,28%	109,00 %	79,43%	-	-	59,92%	83,28%	109,00 %	79,43%	-	-
		- Persentase capaian penerimaan pajak lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101,34 %	117,98 %	109,89 %	99,81%	-	-	101,34 %	117,98 %	109,89%	99,81%	-	-
		- Jumlah pelaporan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
		- Jumlah Sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan	3 Kali	8 Kali	10 Kali	10 Kali	6 Kali	10 Kali	3 Kali	8 Kali	7 Kali	3 Kali	-	-	100%	100%	70%	30%	-	-
		- Jumlah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran PAD						Realisasi Kinerja Sasaran PAD						Capaian Kinerja Sasaran PAD					
			Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026	Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026	Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		- Jumlah aplikasi yang dikelola	5 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	5 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
2		Indeks Kepuasan Masyarakat	78,24	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	78,88	83,73	80,78	82,06	-	-	100,82%	105,99%	100,98%	101,31%	-	-
		Nilai AKIP	68,99	69,00	69,25	69,50	69,75	70,00	60,85	76,13	76,43	78,44	-	-	88,20%	110,33%	110,37%	112,86%	-	-
		- Persentase pemenuhan komponen IKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
		- Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
		- Persentase pemenuhan komponen SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%-	-	-

Evaluasi terhadap Capaian RPJMD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	7,98%	9,77%	8,06%	11,35%	8,12%	10,83%	8,16%	11,10%	8,18%		8,18%		8,18%		BAPENDA
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	6,95%	7,91%	7,00%	7,84%	7,07%	8,72%	7,27%	7,04%	7,68%		8,42%		8,42%		BAPENDA
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah															BAPENDA
a. Pajak Daerah	11	11	11	11	11	11	11	11	11		11		11		BAPENDA
b. Retribusi Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3		3		BAPENDA

Sebagaimana tabel diatas dapat kami jabarkan bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah yang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja pada Tahun 2024 dari target 8,16% terealisasi sebesar 11,10% , Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dari Target 7,27% terealisasi 7,04%, dengan 11 Jenis Pajak Daerah dan 3 Jenis Retribusi Daerah.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

➤ Sumber Daya Aparatur

1.Kondisi Umum Pegawai

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 124 Orang, terdiri dari PNS sebanyak 44 Orang dan Tenaga Kontrak/Honorer sebanyak 80 Orang. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada sebagai berikut :

No	Pegawai	Jumlah (orang)	%
1.	Pegawai Negeri Sipil	44	35,48
2.	TKS/TKK	80	64,52
	Jumlah	124	100,00

Dari jumlah pegawai tersebut diatas, dapat di klarifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel a dan tabel b di bawah ini:

Tabel a – Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
II	4	-	-	-	4	3.23
III	36	-	-	-	36	29.03
IV	4	-	-	-	4	3.23
Tenaga Kontrak	-	-	-	80	80	64.52
Total	44	-	-	80	124	100,00

Tabel b – Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
Laki-laki	21	-	-	39	60	48,39
Perempuan	23	-	-	41	64	51,61
Total	44	-	-	80	124	100,00

Sedangkan penugasannya ke sub unit sebagai berikut:

- 1) Sekretariat : 40 Orang
- 2) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian : 21 Orang
- 3) Bidang Penilaian dan Penetapan : 22 Orang
- 4) Bidang Penagihan dan Keberatan : 23 Orang
- 5) Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan Daerah : 18 Orang

Jumlah Pegawai berdasarkan jabatannya:

- 1) Eselon II B (Kepala Badan) : 1 Orang
- 2) Eselon III A (Sekretaris) : 1 Orang
- 3) Eselon III B (Kepala Bidang) : 4 Orang
- 4) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/JFT) : 15 Orang
- 5) Pelaksana : 23 Orang

Sedangkan klasifikasi berdasarkan pendidikan dan program study pegawai adalah sebagai berikut (tabel c dan tabel d)

Tabel c – Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
Strata-2 (S2)	3	-	-	-	3	2.42
Strata-1 (S1)	27	-	-	42	69	55.65
Sarjana Terapan/D4	-	-	-	1	1	0.81
Sarjana Muda/D3	3	-	-	1	4	3.23
SLTA/SMK	11	-	-	34	45	36.29
SD	-	-	-	2	2	1.61
Total	44	-	-	80	124	100.00

Tabel d – Jumlah Pegawai berdasarkan Strata Pendidikan

Strata Pendidikan	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
Magister						
1. Magister Ekonomi	2	-	-	-	2	1.61
2. Magister Sosial dan Politik	1	-	-	-	2	1.61
Sarjana						
1. Ilmu Sains/Biologi	-	-	-	1	1	0.81
2. Ilmu Sosial	-	-	-	-	-	
3. Ilmu Ekonomi Manajemen	13	-	-	16	29	23.39
4. Ilmu Ekonomi Akutansi	1	-	-	1	2	1.61
5. Ilmu Ekonomi Pembangunan	1	-	-	4	5	4.03
6. Ilmu Pendidikan	-	-	-	4	4	3.23
7. Ilmu Pemerintahan	-	-	-	1	1	0.81
8. Ilmu Administrasi Negara	1	-	-	1	2	1.61
9. Ilmu Administrasi Publik	2	-	-	-	2	1.61
10. Ilmu Administrasi Perpajakan	2	-	-	-	2	1.61
11. Pertanian	1	-	-	-	1	0.81
12. Hukum	3	-	-	6	9	7.26
13. Ilmu Komunikasi dan penyiaran Islam	2	-	-	6	8	6.45
14. Teknik Informatika	-	-	-	-	-	
15. Kehutanan	1	-	-	1	2	1.61
16. Kesehatan	-	-	-	1	1	0.81
Sarjana Terapan						
1. Perpajakan	-	-	-	1	1	0.81
Sarjana Muda						
1. Manajemen Informatika	1	-	-	-	1	0.81
2. Teknik Informatika	1	-	-	-	1	0.81
3. Akutansi Keuangan	-	-	-	-	-	
4. Manajemen Perusahaan	1	-	-	-	1	0.81
5. Komputer	-	-	-	1	1	0.81
Menengah Kejuruan	5	-	-	5	10	8.06
Menengah Atas	6	-	-	29	35	28.23
Sekolah Dasar	-	-	-	2	2	1.61
Total	44	-	-	80	124	100

Kegiatan yang dilaksanakan di bidang kepegawaian adalah :

- 1) Membuat daftar nominatif, bazzeting dan daftar urutan kepangkatan pegawai (DUK), LP2P, membuat usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pensiun, buku induk pegawai.
- 2) Pengembangan pegawai.

- 3) Mengelola daftar hadir.
- 4) Pembinaan pegawai.
- 5) Koordinasi pembuatan DP3.
- 6) Kesejahteraan pegawai.
- 7) Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional.

Adapun jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan adalah sebagaimana tabel e berikut ini:

Tabel e – Jumlah Pegawai yang mengikuti penjenjangan

Jabatan/Staf	Jumlah	%
Spama/Diklat PIM III	2	20
Adum/Adumla/Diklat	8	80
Total	10	100

➤ **Sarana Prasarana**

Pada saat ini Kantor Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlokasi di Jl. Beringin Kuala Tungkal. Berdasarkan Rekapitulasi Barang ke Neraca per 31 Desember 2024 Sarana dan Prasarana yang dimiliki saat ini oleh Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

Neraca Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Per 31 Desember 2024

Uraian	2024
ASET	19.484.659.632,57
ASET LANCAR	2.243.020.189,84
Piutang Pendapatan	8.958.296.624,50
Piutang Pajak Daerah	8.958.296.624,50
Penyisihan Piutang	(7.158.939.730,29)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(7.158.939.730,29)
Beban dibayar di muka	16.508.075,63
Beban Jasa dibayar di muka	16.508.075,63
Persediaan	427.155.220,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	427.155.220,00

Uraian	2024
ASET TETAP	17.064.198.337,73
Peralatan dan Mesin	9.808.481.028,47
Alat Angkutan	2.427.839.300,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	84.600.000,00
Konstruksi dalam pengerjaan	8.943.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(12.317.655.776,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8.933.382.224,00)
ASET LAINNYA	177.441.105,00
Aset Tidak Berwujud	1.035.290.700,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(863.698.760,00)
Aset lain-lain	2.034.953.623,00
Akumulasi Penyusutan aset lain-lain	(2.029.104.458,00)
JUMLAH ASET	19.484.659.632,57
KEWAJIBAN	59.605.360,97
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	59.605.360,97
Pendapatan Diterima Dimuka	59.605.360,97
Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya	59.605.360,97
JUMLAH KEWAJIBAN	59.605.360,97
EKUITAS	25.332.527.765,74
EKUITAS	25.332.527.765,74
Ekuitas	47.138.521.873,74
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	(21.805.994.108,00)
JUMLAH EKUITAS	25.332.527.765,74
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	25.392.133.126,71

➤ **Pendanaan**

Jumlah belanja yang dianggarkan pada DPA Perubahan Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sebesar Rp. 12.958.062.236,00 terealisasi Rp. 11.822.972.906,00 atau 91,24% yang terdiri dari :

1. Belanja Operasional dari anggaran Rp. 12.574.517.236,00 terealisasi Rp. 11.441.741.009,00 atau 90,99% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.132.776.227,00 atau 9,01%
2. Belanja Modal dari anggaran Rp. 383.545.000,00 terealisasi Rp. 381.231.897,00 atau 99,40% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 2,313,103,00 atau 0,60%

5. Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mendukung sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah tahun 2024 dengan Target sebesar 10,83%.

Dalam menjalankan fungsinya untuk menunjang pencapaian target pada pernyataan perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 melaksanakan 2 program dan 8 kegiatan dengan jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran pada Program
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

No	Program	Anggaran		Realisasi	
		Jumlah	Proporsi (%)	Keuangan	
				Jumlah	%
PROGRAM PENDUKUNG					
1.	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.155.968.036	80,22	9.162.094.906	90,21
PROGRAM UTAMA					
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.802.094.200	19,78	2.660.878.000	94,96
JUMLAH 2024		12.958.062.236	100,00	11.822.972.906	91,24

Dari tabel diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan 1 Program Pendukung dan 1 Program Utama. Program Pendukung dengan penyerapan anggaran 90,21% sebagai efisiensi anggaran Program Utama yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah setelah APBDP Tahun 2024 Penyerapan Anggaran sebesar 94,96% .

Dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menetapkan Indikator dan Target Kinerja Kepala Bidang yang dijadikan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang terhadap Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (PK) Eselon III antara lain:

1. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian

Bidang pendaftaran, Pendataan dan pengendalian mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan pendataan, pendaftaran dan pengendalian Pajak Daerah.

Indikator kinerja pada perjanjian kinerja kepala bidang pendaftaran, pendataan dan pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Mendukung tercapainya sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 yaitu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah antara lain :

1. Melakukan pendataan Objek/ wajib Pajak daerah Baru dengan target 2300 SPOP/SPTPD terealisasi 2705 SPOP/SPTPD terdiri dari :
 - PBB-P2 dari target 2000 SPOP terealisasi 2407 SPOP
 - 9 pajak daerah lainnya 300 SPTPD terealisasi 298 SPTPD
2. Melakukan pendaftaran dan pendataan pajak daerah dengan target 123.039 SPOP/SPTPD terealisasi 123.444 SPOP/SPTPD yang terdiri dari :
 - PBB-P2 dari target 114.534 SPOP terealisasi 114.941 SPOP
 - 9 pajak daerah lainnya 8505 SPTPD terealisasi 8503 SPTPD
3. Membuat dokumen hasil pemeriksaan dan pengendalian pengawasan pajak daerah dan laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah kedalam buku induk wajib pajak serta buku perjenis pajak daerah.

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja pada Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	•Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan	10,83%	11,10%	102,47%	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		111.945.600.000	138.039.895.430,37	123,31%	
			Persentase realisasi penerimaan 9 pajak daerah	24,942,884,126	24,896,549,120	99,81%	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	11 Laporan	100,00%	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 Layanan	66 Layanan	110,00%	
	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	100,00%	

2. Bidang Penilaian dan Penetapan

Bidang Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah.

Indikator kinerja pada perjanjian kinerja kepala bidang penilaian dan penetapan badan pendapatan daerah kabupaten tanjung jabung barat untuk mendukung tercapainya sasaran strategis badan pendapatan daerah kabupaten tanjung jabung barat tahun 2024 yaitu “ meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah” antara lain :

1. Melakukan penetapan surat ketetapan pajak daerah dengan target 125.394 SPT/SSPD/SKPD/SPTPD terealisasi 120.761 SPT/SSPD/SKPD/SPTPD yang terdiri dari :
 - PBB-P2 dengan target 114.534 SPT terealisasi 105.352 SPT.
 - BPHTB dengan target 500 SSPD terealisasi 1.546 SSPD
 - 9 Pajak Daerah lainnya dengan target 10.360 SKPD/SPTPD terealisasi 13.863 SKPD/SPTPD.
2. Melakukan penyesuaian NJOP PBB-P2 dan BPHTB dengan target 2.500 Objek Pajak terealisasi 2.936 Objek Pajak.
3. Membuat Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah
 - Surat Ketetapan 9 Pajak Daerah (SKPD/SPTPD)
 - Surta Ketetapan PBB-P2 (SPPT)
 - Surat Ketetapan BPHTB (SSPD)

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja pada Bidang Penilaian dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	• Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan	10,83%	11,10%	102,47%	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		111.945.600.000	138.039.895.430,37	123,31%	
			Realisasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	10.920.000.000	8,673,671,458	79,43%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	2500 OP	2936 OP	117,44%	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	

3. Bidang Penagihan dan keberatan

Bidang penagihan dan keberatan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, kegiatan penagihan dan keberatan.

Indikator kinerja pada perjanjian kinerja kepala bidang penagihan dan keberatan badan pendapatan daerah kabupaten tanjung jabung barat untuk mendukung tercapainya sasaran strategis badan pendapatan daerah kabupaten tanjung jabung barat tahun 2024 yaitu “meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah” antara lain:

1. Melakukan penagihan pajak daerah dengan target 124.894 STTS/SPPD terealisasi 103.636 STTS/SPPD yang terdiri dari :
 - PBB-P2 dengan target 114.534 STTS terealisasi 89.675 STTS
 - 9 Pajak Daerah lainnya dengan target 10.360 SSPD terrealisasi 13.961 SSPD
2. Melaksanakan penyelesaian keberatan Pajak Daerah sebanyak 35 Dokumen Hasil penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
3. Membuat dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah dan data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi serta menyusun daftar ketetapan pajak daerah yang tidak tertagih (terutang).

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja pada Bidang penagihan dan keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	▪ Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan	10,83%	11,10%	102,47%	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		111.945.600.000	138.039.895.430,37	123,31%	
	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	35 Dokumen	35 Dokumen	100%	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	

4. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan

Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas merumuskan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi perencanaan pendapatan, pengkajian dan pengembangan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah di bidang pengembangan pendapatan daerah. Dalam melakukan tugas bidang pengembangan pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengelolaan sistem informasi yang berbasis teknologi dan pelayanan pajak daerah, pengkajian potensi pendapatan serta penyuluhan dan promosi pajak daerah dan perkembangan penerimaan daerah, perhitungan potensi pajak daerah, sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah serta penyusunan draft regulasi PAD. Pada Tahun 2024 untuk layanan informasi pajak daerah yang muktahir dan akurat terealisasi 100% dengan tersedianya pengelolaan sistem informasi dan pelayanan pajak daerah dengan memakai 6 Aplikasi antara lain : SISMIOP, BPHTB, SIMPEDA, SIMPAREDA, E-PAYMENT dan Web Bapenda.

Indikator kinerja pada perjanjian kinerja kepala bidang pembukuan dan pengembangan pendapatan badan pendapatan daerah kabupaten tanjung jabung barat yang mendukung tercapainya sasaran strategis badan pendapatan daerah kabupaten tanjung jabung barat tahun 2024 yaitu “ meningkatnya pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah” antara lain :

1. Melakukan penertiban pengelolaan penerimaan daerah dengan menyusun dokumen rencana pengelolaan pajak daerah dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.
2. Melaksanakan pelayanan pajak daerah melalui teknologi informasi kebijakan pajak daerah dan potensi sumber-sumber pendapatan.
3. Membuat dokumen hasil analisis Pajak daerah, pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah serta laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah serta potensi sumber-sumber pendapatan.

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	•Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan	10,83%	11,10%	102,47%	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		111.945.600.000	138.039.895.430,37	123,31%	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	
	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pajak Daerah	1 Unit	1 Unit	100,00%	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Laporan	16 Laporan	100,00%	

5. Sekretariat

Sekretaris Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung sasaran 2 pada Perjanjian Kinerja Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Akip.

Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

- Persentase temuan audit pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan target 90%
- Persentase Pemenuhan Komponen IKM dengan target 100%
- Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP dengan target 100%

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	IKM		81,00	82,06	101,31%	
		Nilai SAKIP		76,43	78,44	102,63%	
			Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	90,21%	90,21%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dok	5 Dok	100%	
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		▪ Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dok	4 Dok	100%	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		▪ Jumlah Laporan Realisasi Capaian Kinerja	12 Lap	12 Lap	100%	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	100,00%	Jumlah ASN Bapenda Tahun 2024 sebanyak 45 Orang
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	45 Orang	100,00%	
	▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	100,00%	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Lap	12 Lap	100%	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Lap	12 Lap	100%	
	▪ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	12 Lap	100%	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	100,00%	
	▪ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	100,00%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Lap	12 Lap	100,00%	
	▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	
	▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	100%	
	▪ Penyedia Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100,00%	
	▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100,00%	
	▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan		Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	12 Dok	12 Dok	100,00%	
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap	100,00%	
6.	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	
	▪ Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang disediakan	52 Unit	52 Unit	100,00%	
	▪ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	11 Unit	11 Unit	100,00%	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Lap	12 Lap	100,00%	
	▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	100,00%	
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Lap	12 Lap	100,00%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Lap	12 Lap	100,00%	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	100,00	100,00%	
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40 Unit	100%	
	▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	91 Unit	91 Unit	100%	
	▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%	

B. REALISASI ANGGARAN

Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dengan target Rp. 35.894.234.126,00 terealisasi sebesar Rp. 33.628.967.014,00 atau 93,69%, sedangkan jumlah Belanja yang di anggarkan pada APBDP Bapenda Tahun 2024 sebesar Rp. 12.958.062.236,00 terealisasi Rp.11.822.972.906,00 atau 91,24% dengan perincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
4.	<u>PENDAPATAN - LRA</u>	35.894.234.126,00	33.628.967.014,00	93,69
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	35.894.234.126,00	33.628.967.014,00	93,69
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	35.862.884.126,00	33.571.538.713,00	93,61
4.1.1.06.	Pajak Hotel – LRA	428.500.000,00	591.976.652,00	138,15

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%
1	2	3	4	5
4.1.1.07.	Pajak Restoran – LRA	4.712.000.000,00	3.355.747.586,00	71,22
4.1.1.08.	Pajak Hiburan – LRA	15.000.000,00	15.629.600,00	104,20
4.1.1.09.	Pajak Reklame – LRA	514.000.000,00	420.474.858,00	81,80
4.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	17.160.434.126,00	18.202.300.149,00	106,07
4.1.1.11.	Pajak Parkir – LRA	25.900.000,00	56.984.400,00	220,02
4.1.1.12.	Pajak Air Tanah – LRA	350.000.000,00	537.980.555,00	153,71
4.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet – LRA	52.000.000,00	59.456.000,00	114,34
4.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	1.685.050.000,00	1.655.999.320,00	98,28
4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)– LRA	5.500.000.000,00	4.643.264.333,00	84,42
4.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	5.420.000.000,00	4.031.725.260,00	74,39
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah – LRA	31.350.000,00	57.428.301,00	183,18
4.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak – LRA	31.350.000,00	57.428.301,00	183,18
5.	BELANJA	12.958.062.236,00	11.822.972.906,00	91,24
5.1.	BELANJA OPERASI	12.574.517.236,00	11.441.741.009,00	90,99
5.1.01.	Belanja Pegawai	7.327.008.986,00	6.558.369.183,50	89,51
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.764.781.483,00	3.428.613.030,00	91,07
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.000.560.400,00	1.922.629.803,00	96,10
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	673.220.000,00	631.159.773,00	93,75
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	888.447.103,00	575.966.577,50	64,83
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.247.508.250,00	4.883.371.825,50	93,06
5.1.02.01	Belanja Barang	1.455.147.450,00	1.283.096.438,00	88,18
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.525.080.000,00	2.423.973.580,50	96,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	512.730.000,00	461.769.225,00	90,06
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	664.250.800,00	624.232.582,00	93,98
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	90.300.000,00	90.300.000,00	100,00
5.2	BELANJA MODAL	383.545.000,00	381.231.897,00	99,40
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.545.000,00	183.241.197,00	99,29
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	54.149.000,00	53.620.000,00	99,02

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%
1	2	3	4	5
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.720.000,00	5.700.000,00	99,65
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	92.676.000,00	92.150.000,00	99,43
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	32.000.000,00	31.771.197,00	99,28
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	199.000.000,00	197.990.700,00	99,49
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset tidak berwujud	199.000.000,00	197.990.700,00	99,49
5.Z	SURPLUS/ (DEFISIT)	22.936.171.890,00	21.805.994.108,00	95,07

BAB IV

PENUTUP

Untuk Penerimaan Daerah Tahun 2024 dari target Rp. 2.043.302.260.851,00 terealisasi sebesar Rp. 2.009.410.681.820,37 atau 98,34%, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari target Rp. 118.692.650.003,00 terealisasi sebesar Rp. 138.039.895.430,37 atau 116,30%, sedangkan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 128.818.246.430,46 atau 102,55%,

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 yang menjadi Indikator Kinerja Utama Bapenda pada sasaran pertama yaitu Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Dengan Indikator Kinerja Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024 Dengan Target 10,83% terealisasi sebesar 11,10% dengan capaian 102,47%.

Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 yang terdiri dari 11 jenis Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar 93,69%, ini disebabkan :

Ada beberapa Jenis Pajak Daerah yang Realisasinya Melampaui Target antara lain Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet sedangkan Pajak Daerah yang belum tercapai Targetnya yang dikelola oleh Bapenda akan terus diupayakan dan akan dilaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi secara Optimal dengan cara :

- a. Melakukan Pendataan Terhadap Subjek Dan Objek Pajak Daerah
- b. Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi Terkait
- c. Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Penerimaan Daerah
- d. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Melalui Kegiatan Penyuluhan Pajak Pajak Daerah
- e. Terus Berupaya Menggali Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.

Akhirnya melalui laporan kinerja instansi pemerintah di samping berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Government. Selain itu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga bertugas sebagai media pertanggung jawaban penyelenggaraan Negara kepada masyarakat.

Kuala Tungkal,

2025

KEPALA BAPENDA



SUGIANTO, SE

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19670317 199002 1 001